

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan efektivitas suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penilaian terhadap kinerja sebuah perusahaan tentu sangat penting untuk mengidentifikasi peluang guna meningkatkan kualitas perusahaan. Perusahaan pada umumnya didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu tujuan dari perusahaan yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal dan tumbuh berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Peningkatan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran pemilik modal atau pemegang saham. Kinerja perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan (Prasinta, 2012). Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan melihat rasio profitabilitas (Prasinta, 2012). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki (Attar, Islahuddin, & Shabri, 2014). ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi aset. Semakin tinggi ROA perusahaan, maka akan semakin baik.

Pada era globalisasi sekarang ini perusahaan telah berkembang dengan pesat baik perusahaan berskala besar maupun skala kecil. Semakin hari perkembangan

teknologi juga semakin berkembang pesat. Persaingan bisnis pun mulai sengit baik bisnis yang sejenis maupun bisnis yang tidak sejenis. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang menuntut setiap perusahaan untuk terus berinovasi dan mampu bersaing semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mendaftarkan perusahaannya pada Bursa Efek Indonesia atau Pasar Modal. Hal ini memberi dampak yang besar pula bagi perusahaan yaitu lebih mudah mendapatkan investor sehingga memberi tantangan pada perusahaan untuk meningkatkan nilai dan mutu. Strategi-strategi yang baik serta manajemen yang teratur akan menentukan keberlangsungan perusahaan untuk dapat bertahan menjalankan bisnisnya. Berhubungan dengan perkembangan tersebut, salah satu sektor perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah keuangan. Lembaga keuangan merupakan salah satu pihak yang berperan aktif dalam pembangunan perekonomian negara. Contoh dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu perusahaan perbankan. Berdasarkan pada data Bursa Efek Indonesia (2022), telah dicatat sebanyak 13 perusahaan yang memutuskan untuk hengkang dari bursa pada periode 2019-2021, beberapa diantaranya adalah perusahaan perbankan yaitu PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BBNP) dan PT Bank Mitra Niaga Tbk (NAGA) yang delisting pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah perbankan yang listing di bursa justru bertambah, diantaranya yaitu PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) dan PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) yang listing pada tahun 2020 serta PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) dan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB) yang listing sejak tahun 2021. Tiga tahun terakhir ini menandakan adanya fluktuasi kinerja perusahaan dari Bursa Efek Indonesia.

Pada teori sinyal dijelaskan jika semakin besar informasi yang dapat diberikan oleh perusahaan mengenai kinerja dari sebuah perusahaan maka semakin besar pula informasi yang diterima tentang perusahaan oleh individu yang berkepentingan. Dengan demikian dapat menimbulkan kepercayaan dari investor kepada perusahaan dalam menanamkan modalnya. Kepercayaan tinggi yang tercipta akan menghadirkan reaksi positif dari penanam modal kepada perseroan dengan wujud naiknya pergerakan harga saham. Penggunaan teori sinyal pada rasio profitabilitas ROA membuktikan bahwa nilai *return on asset* yang tinggi menjadi sinyal baik untuk investor karena hal itu menyatakan kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik (Anunggraeni, 2021). Investor tentu akan tertarik melakukan investasi pada perusahaan. Untuk meningkatkan peluang perusahaan mendatang dapat dilihat dari laporan keuangannya yang telah mencantumkan laba perusahaan sebagai wujud kinerja perusahaan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan ada pihak yang disebut dengan *principal* atau pemegang saham sebagai pemilik modal yang merupakan pihak penyedia dana dan fasilitas untuk operasional perusahaan. Sedangkan manajer atau *agent* merupakan pihak yang bertugas untuk mengelola dana dan fasilitas yang disediakan oleh pemilik perusahaan (*principal*) dengan kemampuan profesionalnya. Manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham, namun di sisi lain, dalam menjalankan kewajibannya, manajer mempunyai tujuan lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan sendiri. Konflik kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dengan pihak pemegang saham (*principal*) atau yang lebih dikenal dengan istilah masalah keagenan (*agency conflict*) akan berdampak negatif terhadap kinerja sebuah

perusahaan. Menurut Caniscariani (2019) masalah keagenan dapat diminimalisir dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* adalah serangkaian mekanisme yang terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan. Dalam *Good Corporate Governance* terdapat suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana eksternal (Caniscariani, 2019). Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan bagi perusahaan untuk mengatasi kendala yang dapat menghambat perusahaan mencapai tujuan dan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Disamping itu, penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini akan berfokus pada pengendalian internal perusahaan yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Semakin tinggi jumlah dewan direksi, maka akan memungkinkan dalam pembagian fungsi dan tugas, yang dapat mengefisienkan tugas dewan direksi. Kinerja dari dewan direksi yang efektif akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian dari Utomo (2020) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara dewan direksi dan kinerja perusahaan, sedangkan hasil penelitian dari Anggraini *et al.* (2019) menyatakan bahwa dewan direksi tidak

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Dewan komisaris independen merupakan suatu bagian dari perusahaan yang berperan sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Adanya prinsip-prinsip yang melekat dalam dewan komisaris *Good Corporate Governance* seperti *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* yang dilakukan oleh perusahaan dan mekanisme yang dapat meminimalkan konflik kepentingan antara manajer dan para pemegang saham perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas sebagai penyeimbang tugas dan wewenang dari dewan direksi dan dapat memberikan pertimbangan secara objektif, yang dapat mengarahkan operasional perusahaan ke arah yang lebih baik serta berimplikasi pada perbaikan atau peningkatan kinerja. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara dewan komisaris independen dan kinerja perusahaan, seperti pada penelitian Jayanti *et al.* (2021). Sedangkan pada penelitian Utomo (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Komite audit memiliki fungsi pengawasan di dalam perusahaan. Komite audit merupakan posisi yang diwajibkan untuk memiliki spesialisasi di bidang akuntansi sehingga memberikan kontribusi fungsi monitoring yang lebih spesifik dalam pengambilan keputusan terkait dengan kinerja perusahaan. Keberadaan komite audit sebagai pihak yang mendalami masalah keuangan dapat memberikan saran yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara finansial. Perspektif teori agensi menyatakan bahwa komite audit sebagai penengah dan dapat berfungsi

untuk meminimalisir konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Tidak berbeda dengan dewan direksi, pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan juga menjadi perdebatan tersendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini *et al.* (2019), menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan pada hasil penelitian Caniscariani (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Selain *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan kesempatan pertumbuhan juga diduga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah potensi yang ditunjukkan perusahaan untuk berkembang dari tahun ke tahun. Kusumawati dan Safiq (2019) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi, karena didukung oleh aset perusahaan yang juga besar. Selain itu, perusahaan besar cenderung akan mendapatkan atensi lebih dari masyarakat luas dan disertai dengan reputasi yang cukup baik. Dengan demikian, perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas, perusahaan akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya. Sa'adah (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Cardilla *et al.* (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kesempatan pertumbuhan sebuah perusahaan juga diduga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah potensi yang

ditunjukkan oleh perusahaan untuk terus berkembang. Perusahaan yang semakin bertumbuh merupakan salah satu contoh bahwa perusahaan tersebut bekerja dalam kondisi yang baik dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja. Dalam penelitian Caniscariani (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif dari kesempatan pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Febriani dan Sari (2019), kesempatan pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) yang pada penelitian kali ini menjadi tolak ukur dari kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka menurunkan biaya modal (Darmawati, 2004).

Sebelumnya, di Indonesia penelitian mengenai kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan, karena tidak ada batasan mengenai variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, dan dengan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk menguji kembali mengenai kinerja perusahaan dengan melibatkan mekanisme *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, dan kesempatan pertumbuhan sebagai variabel bebas dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), dan Kesempatan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
- 2) Apakah Komposisi Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
- 3) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 -2021?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
- 5) Apakah kesempatan pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh komposisi Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kesempatan pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan diharapkan dapat menjelaskan pengaruh mekanisme internal dari *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kesempatan pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan khususnya perusahaan perbankan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan yang dijadikan objek penelitian mengenai pengaruh mekanisme internal *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kesempatan pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Sinyal atau *Signalling Theory*

Teori Sinyal atau *Signalling Theory* dikemukakan pertama kali oleh Spence dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signalling* pada tahun 1973. Teori sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memberi petunjuk kepada investor mengenai bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan di masa depan. Teori sinyal menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal – sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Secara umum sinyal dijadikan sebagai isyarat yang dilaksanakan oleh perseroan pada investor. Wujud dari sinyal ini bermacam-macam, ada yang langsung diamati atau harus menelaah lebih dalam untuk mengetahuinya. Hal positif dalam *signaling theory* dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus. Dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar.

Jogiyanto (2000) menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) (Nugroho, 2019). Teori ini menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Teori sinyal memberi penjelasan dimana perusahaan hendaknya melakukan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal perusahaan secara merata dan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan juga secara bersama-sama. Secara garis besar teori sinyal erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah *go-public* pada umumnya didasarkan pada analisis rasio keuangan (Nugroho, 2019). Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Berdasarkan *Signalling Theory*, jika perusahaan hendak berupaya membagikan informasi kepada pihak eksternal atas keadaan mereka guna mengurangi terdapatnya kesalahan informasi, sehingga pihak eksternal akan lebih mengenali keadaan perusahaan. Perusahaan dapat memberikan sinyal atau informasi tentang bagaimana kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan melalui laporan

keuangan perusahaan. Pengungkapan atau pelaporan perusahaan mengenai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengirimkan sinyal positif kepada *stakeholders* dan pasar.

2.1.2. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontrak ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Teori keagenan ini dikembangkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976). Pada perekonomian modern seperti sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang melakukan pemisahan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Pengelola perusahaan yang diserahkan kepada tenaga profesional yang bukan pemilik perusahaan dikarenakan pemilik tidak mampu lagi karena keterbatasannya untuk mengendalikan perusahaan yang menjadi semakin besar dan kompleks. Pemisahan ini bertujuan agar pemilik perusahaan dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin, karena perusahaan dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dan lebih memahami bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Namun demikian, pemisahan tersebut juga memungkinkan munculnya masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*).

Teori keagenan secara khusus menjelaskan tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaannya kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Masalah keagenan (*agency problem*) muncul dalam dua bentuk yaitu antara pemilik perusahaan (*principal*)

dengan pihak manajemen (*agent*) dan antara pemegang saham (*stakeholders*) dengan pemegang saham obligasi (*bondholders*) (Husnan dan Pudjiastuti, 2002:12). Dalam penerapan *corporate governance*, hubungan antara *principal* dengan *agent* merupakan hal yang mendasar. Hal ini dapat dilihat pada teori-teori yang melandasi pengertian mengenai perusahaan sebagai tempat penerapan *corporate governance* (tata kelola perusahaan). Perusahaan dapat dipandang dari dua teori, yaitu teori pemegang saham (*shareholding theory*) dan teori *stakeholders* (*stakeholding theory*) (Tjager, 2003). *Shareholding theory* menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, *Stakeholding theory* menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

Pada teori keagenan dikemukakan jika antar pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda, maka dapat menimbulkan adanya konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen ini memiliki dampak negatif yaitu keleluasaan manajemen (pihak pengelola) perusahaan untuk memaksimalkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena *asymmetry information* antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki akses memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memantau tindakan manajemen (Hastuti, 2010). Menurut Sartono (2001:10) yang dimaksud dengan konflik dalam teori keagenan ini adalah konflik yang timbul

antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Seharusnya manajemen sebagai agen pemegang saham harus mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Tetapi justru lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah dalam keagenan disebabkan karena adanya pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerjasama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak pemilik perusahaan (*principal*) karena pemilik terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Untuk mengatasi konflik yang terjadi diperlukan suatu mekanisme yang dapat melindungi pemilik sehingga manfaat yang diperolehnya dari perusahaan bernilai wajar dan tinggi. *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada teori keagenan. *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan antara pihak pengelola perusahaan (*agent*) dengan pihak pemilik perusahaan (*principal*).

2.1.3. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance sangat penting pada suatu perusahaan. Istilah *Good Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari

nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (Kusmayadi *et al.*, 2015:8). *Good Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Kusmayadi *et al.* (2015:11) juga menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Isu *corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau seringkali dikenal dengan masalah keagenan. *Good Corporate Governance* yang di dalam perspektif hubungan keagenan diharapkan sebagai suatu cara yang bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pada perusahaan. *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi menguntungkan pemilik perusahaan. FCGI mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem untuk mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua

pihak yang berkepentingan. Sistem *Good Corporate Governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang berkesinambungan.

2.1.4. Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Perusahaan adalah salah satu garda terdepan dalam meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia. *Good Corporate Governance* sesungguhnya sudah diperkenalkan sejak tahun 2002 oleh pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN yaitu dengan dikeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 yaitu sebagai berikut:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 4) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *Good Corporate Governance*, terdiri dari tiga elemen penting yaitu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Struktur memiliki peran yang sangat fundamental dalam penerapan mekanisme *Good Corporate Governance*. Struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkan sistem dalam penyusunan mekanisme *Good Corporate Governance* perusahaan. Struktur ini berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan

pemegang saham) dan *stakeholders* lainnya serta aturan-aturan maupun prosedur pengambilan keputusan dalam hubungan peraturan.

Struktur *Good Corporate Governance* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur pengendalian internal dan struktur pengendalian eksternal. Struktur pengendalian eksternal terdiri dari pihak-pihak berkepentingan yang berasal dari luar perusahaan seperti pasar modal, pasar uang, regulator dan profesi lainnya. Pada penelitian ini berfokus pada struktur pengendalian internal perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit.

a) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kedudukan sebagai organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006). Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori keagenan. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan *manajer* di dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen (Sembiring, 2003).

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. KNKG (2006) juga membedakan dewan komisaris menjadi dua kategori, yaitu dewan komisaris independen dan dewan komisaris non independen. Dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Dewan komisaris non independen merupakan komisaris yang memiliki hubungan terafiliasi dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan *controlling shareholders*, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

b) Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pihak dalam suatu perusahaan yang bertugas menjalankan operasional dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator, dan lain-lain. Dengan peran begitu besar dalam pengelolaan perusahaan, dewan direksi pada

dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

c) Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Hakim (2009), menyatakan bahwa suatu komite audit yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Good Corporate Governance* di perusahaan. Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh Suryana dan Yustiayanda (2006), komite audit pada dasarnya mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

a) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan hasil usaha, rencana dan komite perusahaan jangka panjang.

b) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan termasuk dalam hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris (pengawas) dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam (Surat Edaran, 2003) menyatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin, dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

2.1.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala, atau variabel yang menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal, dan lain-lain. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan belum jelas arahnya. Pada perusahaan besar mungkin saja terjadi masalah keagenan yang lebih besar karena lebih sulit di monitor, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Disisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan tumbuh yang

lebih tinggi dan membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga membutuhkan mekanisme *Good Corporate Governance* yang lebih baik (Darmawati, 2004). Ukuran perusahaan menunjukkan pengalaman, kemampuan tumbuh perusahaan serta kebutuhan dan kemungkinannya untuk melakukan ekspansi di masa mendatang.

2.1.7. Kesempatan Pertumbuhan

Kesempatan pertumbuhan merupakan potensi perusahaan untuk berkembang. Perusahaan yang pertumbuhannya tinggi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan aktivitas usahanya. Perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang memiliki pertumbuhan margin, laba, dan penjualan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan *corporate governance* dalam rangka untuk menurunkan biaya modal.

UNMAS DENPASAR

2.1.8. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dan menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan mencapai hasilnya setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu dan kinerja organisasi lain, serta seberapa jauh meraih tujuan serta target yang telah ditetapkan (Muhammad, 2018:14 dalam Nugrahayu dan Retnani, 2015). Menurut Caniscariani (2019), kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai aspek, diantaranya aspek finansial, kepuasan

pelanggan, operasi dan pasar internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan *shareholder/stakeholder*. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sebuah perusahaan, biasanya diukur dengan kinerja mana yaitu manajemen perusahaan dengan indikator akuntansi. Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan akan diukur dengan indikator akuntansi yaitu *Return on Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan yaitu kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Attar *et al.*, 2014).

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut ini adapun hasil penelitian yang digunakan didapat dari penelitian terdahulu yaitu:

Apriliani *et al.* (2018) melakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitiannya, Apriliani *et al.* menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menganalisis data sehingga menghasilkan bahwa ukuran dewan dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Aryani *et al.* (2018) telah melakukan penelitian untuk mengetahui apakah struktur dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi data panel. Adapun variabel

independen yang digunakan yaitu komisaris independen, komisaris wanita, dan ukuran dewan komisaris. Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komisaris wanita dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Masitoh *et al.* (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan untuk variabel proporsi dewan direksi independen memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena dewan direksi independen di perusahaan sangatlah kecil sehingga belum dapat menjalankan fungsinya untuk mencegah praktek *insider self-dealing* di perusahaan dan belum banyak perusahaan yang mengangkat salah seorang anggota direksinya untuk menjadi direktur independen.

Anggraini *et al.* (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan ROA. Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa ada korelasi

positif antara komite audit terhadap kinerja perusahaan sedangkan ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Caniscariani (2019) melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Variabel bebas yang digunakan yaitu jumlah dewan direksi, komposisi dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan kesempatan pertumbuhan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah dewan direksi, komposisi komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan, sedangkan variabel kesempatan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Cardilla *et al.* (2019) melakukan penelitian terhadap pengaruh pada kinerja perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas antara lain kas koperasi, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Cardilla *et al.* menggunakan teknik analisis regresi linier berganda pada penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa hanya umur perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap laba, namun dengan tanda yang berubah. Artinya bahwa semakin tinggi umur perusahaan, maka akan semakin rendah laba perusahaan.

Peneliti Merryana *et al.* (2019) menggunakan variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit

sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan. Merryana *et al.* menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Yunina *et al.* (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Peneliti menggunakan perusahaan bank syariah pada tahun 2015-2017 sebagai sampel dalam penelitian. Yunina *et al.* menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji sampel. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Peneliti Agatha, Nurlaela dan Samrotun (2020) melakukan penelitian terhadap kepemilikan manajerial, institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kinerja keuangan perusahaan *food and beverage*. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dari keempat variabel bebas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan *food and beverage*. Sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan *food and beverage*.

Peneliti Antonius (2020) melakukan penelitian terhadap pengaruh kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel struktur modal, *firm age*, *firm size*, *growth opportunities*, dan *earning per share*. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu struktur modal, *growth opportunities*, dan *earning per share* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. *Firm age* dan *firm size* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Ayuningtyas *et al.* (2020) melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel bebas dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan dewan direksi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Utomo (2020) melakukan penelitian terhadap pengaruh pada kinerja perusahaan. Utomo menggunakan variabel bebas komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi untuk menguji pengaruh pada kinerja perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Aditya dan Efendi (2021) melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel bebas yaitu transaksi pihak berelasi, *size*, *sales*, dan *growth*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dan *growth* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan *size* berpengaruh negatif signifikan dan *sales* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Nurhana *et al.* (2021) melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan variabel bebas antara lain dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan, dengan variabel terikatnya kinerja perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan, maka ROA menjadi rendah (turun). Ini terjadi karena diduga bahwa sektor keuangan yang sebagian besar terdiri atas sub sektor bank (proporsi Bank 73,68% dan asuransi 26,32%), menggunakan asetnya untuk melakukan ekspansi yaitu dengan membuka kantor-kantor cabang baru sehingga ROA yang dihasilkan menjadi tidak begitu tinggi.

Pariutami *et al.* (2021) menggunakan variabel bebas dewan direksi, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, struktur modal, risiko kredit, dan pertumbuhan perusahaan untuk menguji pengaruh pada kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Pada penelitian ini, Pariutami *et al.* menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dewan direksi dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Sedangkan variabel struktur modal dan risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan perbankan.